

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andasasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*. Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa-Barat, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Notaris Selayang Pandang*. Bandung : Alumni, 1983
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hadjon, M. Philipus. Et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. 7. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Kie, Tan Thong. *Buku I, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notariat*. Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung : Alumni, 1984
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kelima. Cet I. Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003.
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cet 2. Jakarta : Raja Grafindo, 1993.
- Nugraha, Safri. Et al. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Badan Peraturan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1983
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1980.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004. LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burger Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1987.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Permindahan, Dan Pemberhentian Notaris*. PerMen Hukum Dan HAM-RI No. M.01.-HT.03.01 Tahun 2006, tanggal 5 Desember 2006.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*. PerMen Hukum Dan HAM-RI No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 8 November 2007.

## **C. Makalah**

Setiawan, Wawan. “*Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut sistem Hukum Indonesia*”. Makalah disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya 22-23 Mei 1998.